**Pemberdayaan Lokasi Wisata Datae dalam Meningkatkan**

**Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang**

**SOFYAN B.**

**Abstract**

This research was aimed to determine the empowerment of Datae’s tourism site in improving the local revenue of Sidenreng Rappang Regency. In addition, this research would also determine the influencing factors.

This research was a design of descriptive-qualitative, with the intention just to give a description of ​​ Datae’s tourist site empowerment in improving the local revenue. This research also used direct survey method. The methods used to collect data were direct observation, interviews, and questionnaires to selected respondents. The sampling methods used was total sampling to take all 65 people or the entire population.

The results were of the following, cultural factors was good by scoring 56,92% rate, contributing factors was sufficient at 69,23%, and motivation factor was good at 60%. The next factor was the communication which gained 73,85% for maximum answer, and the latter was a the knowledge factor which scored 60% to consider as adequate. Those results indicated a good category of Datae’s tourist site empowerment in improving the local revenue of Sidenreng Rappang Regency.

1. pendahuluan

Dalam upaya memecahkan permasalahan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimensi teori yang merupakan titik tolak berpikir yang dapat memberikan fondasi dan pedoman yang bersifat teoritis. Aplikasi dilapangan terkadang suka berbeda antara aspek teoritis dengan praktek yang sangat dipengaruhi dengan keadaan. Namun apabila dalam praktek tersebut memiliki landasan teori yang kuat dapat membawa keteraturan, kesederhanaan dan mekanisme yang jelas dalam mencapai tujuan. Untuk itu landasan teori yang ada relevannya dengan masalah merupakan hal yang pokok untuk mempertemukan jalan terbaik dalam memecahkan masalah.

Kepariwisataan merupakan variabel yang dipengaruhi (*dependent varibel)* dan diasumsikan yang mempengaruhinya ialah kebijakan publik mengenai pariwisata. Artinya bagaimana dan kebijakan jenis apa yang ada serta kebijakan alternatif apa saja yang relevan, sehingga membawa keberhasilan kegiatan kepariwisataan.

Melalui pendapat para ahli yang membahas kebijakan beserta unsur-unsurnya dan pariwisata dengan berbagai komponen yang memperluas bahasan dapat dijadikan pegangan bagi pemecahan masalah.

Upaya menangani berbagai hal yang ditimbulkan oleh akibat banyaknya permasalahan sejak diberlakukannya otonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Sulawesi Selatan tidak boleh begitu saja cuci tangan. Mau tidak mau karena eksistensinya masih diakui sebagai salah satu pemerintah yang syah melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan, serta lebih lanjut bahwa pemerintah Sulawesi Selatan sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, maka secara arif harus memberikan kontribusi dan bila perlu dapat memberikan pembinaan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merealisasikan Otonomi Daerah secara baik dan benar.

Melihat kewenangan pemerintah seperti yang telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak ada alasan bagi Pemerintah Provinsi untuk tidak turut menangani aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dengan itikad baik dan saling menghormati antara lembaga pemerintahan, setiap aparatur harus berusaha mendorong dan memberikan kontribusi yang baik pada semua pihak agar kehidupan masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang beserta jajarannya, dituntut untuk lebih profesional dalam melahirkan pemerintah yang kuat dan berwibawa.

Mengingat potensi dan jangkauan kedepan Pemerintah Kabupaten Sidrap harus menangani secara serius sumber daya alam yang dimiliki, misalnya Taman Wisata Datae, agar benar-benar dapat menjadi energi bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Potensi Taman Wisata Datae terlihat kurang diberdayakan, dan kelihatannya selalu sepih dari pengunjung, sehingga hal demikian belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar taman wisata tersebut, sehingga kurang memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan keadaan ini, seharusnya menjadi pemicu dan pemacu bagi pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan dan lebih mengembangkan obyek wisata tersebut, demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya pemerintah kabupaten sidrap tidak seharusnya memiliki posisi yang lemah dari segi keuangan untuk mengembangkan obyek wisata tersebut, karena potensinya yang demikian besar. Namun dengan berbagai faktor, terutama pengaruh krisis dimensi secara nasional yang dialami pemerintah. Dipertimbangkan dalam berbagai dimensi, obyek Wisata Datae dapat menguntungkan dan memiliki prospek yang cerah, asalkan terdapat political will yang kuat dari pemerintah dan didukung penuh oleh masyarakat.

Sebagai observasi awal, penulis menemukan berbagai permasalahan, 1) bahwa Taman Wisata Datae belum ada perhatian serius dan berkesinambungan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan taman wisata tersebut, hal ini terlihat kurangnya fasilitas atau tidak ada pembenahan dan penambahan tempat-tempat yang dapat menarik pengunjung, 2) pengelola taman Wisata Datae belum mampu mengembangkan sumber dayanya, hal ini terlihat Taman Wisata Datae sepertinya kurang terawat, sehingga setiap tahunnya bukannya bertambah pengunjung, tetapi sebaliknya justru lebih berkurang dan kelihatan kurang menarik, dan 3) dengan berkurangnya pengunjung ketempat wisata tersebut, maka pendapatan asli daerah pun juga berkurang.

1. Pengertian Pemberdayaan

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi;
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran;
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan
4. Pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya

Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah *(empowerment of the powerless).*

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, di mana ‘daya’ bermakna kekuatan (power). Bryant & White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam *(build-in)* untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.

Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayakan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Prijono dan Pranarka, 1996).

Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya (Prijono dan Pranarka, 1996).

Sedangkan dalam kajian ini pengertian “pemberdayaan” dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi di mana kesempatan-kesempatan ekonomis tertutup bagi mereka, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor tersebut.

Kata pemberdayaan sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*”. Dewasa ini populer digunakan pada berbagai kesempatan pembicaraan. Dilihat secara etimologi, kata pemberdayaan berasal dari kata daya atau *power*. Dengan demikian pemberdayaan akan berkaitan dengan daya, kewenangan atau kekuasaan tertentu.

Menurut Wasistiono (2001:46), mengidentifikasikan bahwa “pemberdayaan sebagai upaya memberi keberanian dan kesempatan kepada individu mengambil tanggungjawab perorangan guna meningkatkan cara kerja mereka dan memberi kontribusi pada tujuan organisasi. Pemberdayaan berkaitan dengan upaya pemberian daya, wewenang, kekuasaan dari atasan kepada bawahan dengan tujuan agar kepentingan bersama dapat tercapai secara optimal”.

Adapun sasaran dan ruang lingkup pemberdayaan dapat dibedakan empat macam pemberdayaan, yaitu:

* + 1. Pemberdayaan pada individu, anggota organisasi atau anggota masyarakat.
    2. Pemberdayaan pada tim atau kelompok masyarakat.
    3. Pemberdayaan pada organisasi.
    4. Pemberdayaan pada masyarakat secara keseluruhan.

Munculnya kesadaran akan perlunya pemberdayaan, baik pada individu, tim kerja, organisasi maupun masyarakat didorong oleh berbagai faktor. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah:

1. Meningkatnya kesadaran individu akan hak dan harga dirinya, baik sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai ekonomi. Perubahan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran manusia akan hak azasinya.
2. Perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang sangat cepat akibat adanya revolusi komunikasi menuntut pengambilan keputusan secara cepat pula.

Derasnya arus informasi disertai tersebarnya pusat-pusat informasi, menyebabkan pola pengambilan keputusan secara terpusat tidak relevan lagi.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas, sehingga merupakan sumber daya yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena merupakan penggerak sumber daya non manusia, seperti modal, mesin, teknologi, material, dan lain-lain.

F.C. Gomes (2005:12), bahwa sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, dan karya. Satu-satunya sumber daya yang memiliki ratio, rasa dan karsa

Selanjutnya, Simanjuntak (2003:1) bahwa sumber daya manusia mengandung dua pengertian, pertama sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang jasa.

Pengertian kedua sumber daya manusia adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Betapapun majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, namun jika tanpa sumber daya manusia, maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Betapapun bagusnya perumusan tujuannya dan rencana organisasi, hanya akan sia-sia belaka, jika unsur smber daya manusianya tidak diperhatikan, apalagi kalau diterlantarkan.

Jadi tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah agar sumber daya manusia yang jumlahnya sangat besar di negara kita ini dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang produktif dalam menunjang aktivitas pembangunan nasional. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka jumlah penduduk yang besar tersebut tidak lagi menjadi beban nasional/beban negara tetapi berubah menjadi modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional pada masa mendatang.

Dengan demikian jelas bahwa ada dua aspek yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja manusia Indonesia dalam melaksanakan berbagai aktivitas pembangunan, dan pada sisi lain berkaitan erat dengan peningkatan taraf hidup itu sendiri. Ini berarti kepentingan masyarakat dan kepentingan individu berjalan seiring dan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas pembangunan.

Kedua aspek ini akan berjalan bersama, karena dengan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu tugas, maka dengan sendirinya taraf hidup akan dapat terpenuhi. Dan peningkatan kedua aspek di atas adalah hasil dari pendidikan formal dan sebagai hasil pendidikan keterampilan seperti kursus-kursus, penataran-penataran dan jenis pendidikan lainnya.

Langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurut Simanjuntak (2003:5), adalah mengutamakan pembangunan yang meningkatkan perluasan lapangan kerja, meningkatkan pengadaan pangan dan mutu gizi, memperluas fasilitas dan memperbaiki mutu pendidikan dan latihan kerja serta meningkatkan pelayanan kesehatan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan manusia pembangunan yang tangguh, berbudi luhur, cakap, terampil, percaya diri sendiri serta bersemangat membangun.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas, sehingga merupakan sumber daya yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena merupakan penggerak sumber daya non manusia, seperti modal, mesin, teknologi, material, dan lain-lain.

Potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Betapapun majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, namun jika tanpa sumber daya manusia, maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Betapapun bagusnya perumusan tujuannya dan rencana organisasi, hanya akan sia-sia belaka, jika unsur sumber daya manusianya tidak diperhatikan, apalagi kalau diterlantarkan.

Dalam hubungan ini pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena pendidikan menambah pengetahuan, baik yang secara langsung dan tidak langsung yang menyangkut pekerjaan, maupun mengenai cara dan teknik dalam menyelesaikan suatu tugas kerja secara tepat guna. Dengan perkata lain, pendidikan pada dasarnya dapat dipandang sebagai investasi yang imbalannya baru dapat dinikmati beberapa tahun kemudian.

Selanjutnya, menurut Prijono Tjiptoherijanto (2001:114), bahwa daya tahan untuk belajar dan berpikir sangat dipengaruhi oleh kecukupan gizi yang diterima semasa usia balita.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dari hasil penelitian Inkelas dan Smith yang dikutip oleh Sahabuddin bahwa, pendidikan adalah yang paling efektif untuk mengubah manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa dampak pendidikan tiga kali lebih kuat dibandingkan dengan usaha-usaha lainnya (2005:119).

Jika ditelusuri lebih jauh, proses pendidikan yang berlangsung dilingkungan keluarga pada hakekatnya merupakan bentuk partisipasi orang tua anak dalam kegiatan pembangunan. Pendidikan dalam keluarga adalah salah satu aspek yang perlu dibina dan dikembangkan karena berkaitan dengan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karenanya seluruh lapisan masyarakat harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan aktivitas pendidikan.

Sahabuddin (2005:39), mengemukakan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan, sedangkan hakekat pembangunan yang dikemukakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Di samping itu tinggi rendahnya tingkat pendidikan anak dipengaruhi oleh besar kecilnya penghasilan keluarga, sedangkan besar kecilnya penghasilan anak kelak, berhubungan erat dengan tingkat pendidikannya. Gambaran yang dikemukakan di atas cukup logis karena pada dasarnya peningkatan pendidikan mengarah kepada peningkatan produktivitas kerja sedangkan meningkatnya produktivitas kerja akan berdampak positif pada penghasilan yang diperoleh. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prijono Tjiptoherijanto, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi produktivitas kerja dan semakin besar jumlah penghasilan (2001:15).

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pusat dan Daerah, maka setiap penerintahan, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja lebih keras dalam mencapai kemandirian. Dalam berbagai hal, usaha yang dilakukan harus mengarah kepada penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Dukungan kegiatan tersebut perlu dana yang memadai diperoleh dari hasil sendiri, dengan memanfaatkan dan mengelola potensi daerah. Sumber-sumber yang dimiliki daerah sebagai berikut:

1. Sumber-sumber Penerimaan Daerah, terdiri atas:
2. Pendapatan Asli Daerah
3. Dana Perimbangan
4. Lain-lain penerimaan yang sah
5. Sumber Pendapatan Asli Daerah, Terdiri dari :
6. Hasil Pajak Daerah
7. Hasil Retribusi Daerah
8. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
9. Lain-lain hasil pendapatan daerah
10. Dana Perimbangan, terdiri dari :
11. Bagian Daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumberdaya alam (SDA).
12. Dana Alokasi Umum (DAU).
13. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang digali dari potensi yang ada pada daerah tersebut. Untuk menjadi suatu daerah yang mampu mengurus rumah tangganya sendiri dan dapat menjamin kelangsungan pembangunan di daerah harus dilengkapi dengan syarat-syarat keuangan yang cukup, sebab tanpa keuangan yang cukup mustahil tugas-tugas tersebut dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan itu, maka kepada pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan, baik berupa lapangan pajak dan retribusi daerah, maupun dalam bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kesemuanya diatur dalam peraturan daerah.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberdayaan lokasi wisata.

Dalam pemberdayaan sektor pariwisata memang banyak faktor yang berpengaruh, namun menurut menurut Prof Soedjito S, SH,MA (1987) faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut terdiri dari:

1. Faktor Budaya

Menurut Prof Soedjito S, SH,MA (1987) dijelaskan bahwa Kebudayaan *(culture)* adalah pola-pola tingkah laku dan hasil tingkah laku manusia yang menjadi milik dari suatu masyarakat karena adanya suatu *social heritage*. Pulau Bali menjadi tujuan wisata mancanegara bukan hanya disebabkan oleh keindahan pantai Bali, namun juga disebabkan oleh budaya Bali. Keramah tamahan dan pola-pola perilaku orang Bali yang menjadi kesan bagi wisatawan untuk datang kembali ke Bali karena mereka merasa dihargai dan dilayani dengan baik.

1. Faktor Komunikasi

Menurut Larry (2003) menjelaskan bahwa kata komunikasi adalah adanya proses pembicaraan dua orang atau lebih yang saling mengerti. Selanjutnya Joseph A Devito (2001:14) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa komunikasi memberikan arti dalam pesan yang diterima oleh orang lain sehingga dia dapat memahami pesan dan terkesan dengan hal itu.

1. Faktor Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo mengatakan bahwa pengetahuan adalah hasil tahu setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan tentang objek pariwisata merupakan sebuah kelemahan yang paling utama dimana masih rendahnya pengetahuan orang tentang adanya objek pariwisata.

1. Faktor Motivasi

Dessler (1994) menjelaskan bahwa motivasi adalah sebuah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara prilaku yang berhubungan dengan lingkungan dimana dia tinggal. Motivasi individu sangat diharapkan untuk dapat membangkitkan dirinya dan mengarahkan serta memelihara perilaku sehingga orang yang berada pada lingkungannya dapat terpengaruh dan merasa senang untuk tinggal di lingkungannya.

1. Faktor Penunjang

Faktor penunjang yaitu sarana dan prasarana sangat penting bagi sebuah daerah wisata karena akan mempermudah para wisatawan untuk berkunjung dan berwisata pada sebuah objek pariwisata.

1. METODE Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan alasan bahwa di Kecamatan tersebut terdapat lokasi wisata yang cukup bagus dan berpotensi untuk dikembangkan, dan obyek wisata tersebut juga strategis karena mudah dijangkau lokasinya, tidak sama dengan obyek wisata yang lain misalnya di Desa Lagading yang cukup jauh lokasinya.

Populasi menurut Sugiyono (2009:90), adalah wilayah generaslisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, dan sebahagian tokoh masyarakat di Datae yang berjumlah 65 orang.

Sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2009:96), mengemukakan bahwa sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah 65 orang atau keseluruhan populasi, dengan rincian dua (2) orang sebagai informan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata dan Kepala Bidang Pariwisata. Sedangkan responden sebanyak 63 orang dengan pertimbangan bahwa sampel dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan pada objek lokasi penelitian, sehingga dapat diperoleh keterangan yang berhubungan dengan data serta gambar dari objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang berhubungan dengan penelitian.
  2. Angket/kuisioner, yaitu cara mengumpulkan data dan informasi dengan menyebarkan angket kepada responden untuk dijawab.
  3. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan informan kunci yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
  4. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data dengan mempelajari catatan dari pihak yang mempunyai otoritas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat dari sumber-sumber tertulis, baik berupa laporan atau tabel dan gambar, sehingga menjadi sumber data yang dapat dipercaya.

Teknik analisis data yang digunakan pada dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Arikunto (2001:97), menyatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

Sedangkan analisis data kualitatif menurut Subagyo (2001:106), bahwa analisis kualitatif dilakukan terhadap data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran. Sedangkan terhadap data kuantitatif yaitu data dalam bentuk jumlah dituangkan untuk menerangkan sesuatu kejelasan dari angka-angka atau membandingkan dengan gambaran baru, kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat.

Teknik analisis data tersebut dilakukan sepanjang penelitian bersifat terbuka, sehingga memungkinkan adanya perubahan, perbaikan dan penyempurnaan data yang masuk.

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam proses penelitian untuk dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalahnya dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menganalis data dengan menggunakan analisis data deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

1. Hasil penelitian

Pelayanan pemerintah merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkat penerimaan asli daerah. Pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping abdi negara.

Untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat seperti yang diharapkan, bukanlah suatu hal yang mudah, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

Menurut Moenir (1998:40-41), faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut, yaitu:

Tidak atau kurangnya kesadaran atau kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan melayani dengan seenaknya (santai), padahal orang menunggu hasil kerjanya sudah gelisah. Akibat wajar ini adalah tidak adanya disiplin kerja.

Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada belum memadai, sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pengorganisasian pelayanan yang belum serasi, sehingga terjadi simpang siur dalam pembangunan tugas, tumpang tindih (*over lapping*) atau tercecernya suatu tugas tidak ada yang menangani.

Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup meskipun secara minimal. Akibatnya pegawai tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam kerja dengan cara antara lain menjual jasa pelayanan.

Kemampuan tugas yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai akibatnya pekerjaan menjadi lamban, waktu yang hilang, dan penyelesaian masalah terhambat.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi pelayanan dalam sektor pariwisata di jelaskan sebagai berikut:

1. Faktor budaya

Dari hasil penelitian di lapangan, rendahnya pelayanan yang diberikan sangat dipengaruhi oleh tata krama maupun sopan santun masyarakat tersebut dalam menjamu wisatawan.

Hal ini sejalan dengan tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan, terutama di bidang budaya seperti yang menunjukkan bahwa responden cenderung memilih jawaban baik yaitu terdapat 36 orang (57,14%), yang menjawab cukup baik terdapat 24 orang (38,09%), sedangkan yang menjawab kurang baik hanya terdapat 3 orang (4,76%).

1. Faktor penunjang

Secara umum, penyediaan fasilitas pada Taman Wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Wisata Datae sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari bangunan yang ada seperti pintu masuk yang besar, kios, tempat parkir dan lain-lainya. Namun demikian, penyediaan fasilitas wisata yang disediakan oleh pemerintah dapat dikatakan masih ada yang kurang dan perlu untuk disediakan, yaitu tersedianya tempat pembungan sampah yang memadai, serta belum dilengkapi dengan mushollah dan WC umum. Hal ini sejalan dengan tanggapan responden terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yang rata-rata cukup memadai, di mana terdapat 44 orang (69,84%) menyatakan cukup memadai, 15 orang (23,80%) responden menyatakan memadai, yang menjawab sangat memadai hanya 4 orang (6,34%), sedangkan tidak ada responden yang menjawab kurang memadai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala SKPD Dispora Kabupaten Sidenreng Rappang, Andi Anis Dahlan S.T., M.Si maka didapatkan kenyataan bahwa masih perlu adanya penambahan sarana dan prasarana serta fasilitas kebutuhan suatu objek wisata yang sesuai dengan lokasi tersebut. (Wawancara tanggal 1/3/2013).

Senada dengan itu, Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini Dra. Sumarni Azis, M.Si mengatakan bahwa perlu adanya penambahan fasilitas seperti *green house* sebagai tempat pertemuan yang juga dapat digunakan sebagai tempat pendidikan dan latihan (diklat) yang dapat menampung beberapa peserta karena tidak tertutup kemungkinan kabupaten lain bisa tertarik untuk datang menggunakan tempat itu karena keindahan alamnya.

Selain itu juga rumah-rumah adat yang ada sebagai perwakilan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang agar dapat digunakan suatu tempat pajangan hasil kerajinan setiap kecamatan.

Perhatian lain juga ditujukan pada tempat parkir kendaraan pengunjung yang masih harus diperluas agar pengunjung dapat lebih leluasa menggunakan area parkir yang dapat menampung lebih banyak kendaraan dan lebih meningkatkan keamanan. (Wawancara tanggal 1/3/2013).

1. Faktor Motivasi

Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000:84), mengemuka-kan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta hasil kerja perusahan yang menentukan tingkat upah dengan mempertimbangkan standar kehidupan normal, akan memungkinkan pegawai bekerja dengan penuh motivasi.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja banyak dipengaruhi oleh terpenuhi tidaknya kebutuhan minimal kehidupan pegawai dan keluarganya. Hasil olahan data menunjukkan bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan motivasi saat ini sudah baik, dimana terdapat 38 responden (60,31%) yang memberi jawaban baik, 17 orang (26,98%) responden memberi jawaban sangat baik, dan hanya 8 orang (12,69%) yang memberi jawaban cukup baik, sedangkan tidak ada responden yang memberi jawaban kurang baik.

Peningkatan motivasi kerja aparat yang telah dilakukan melalui pemberian insentif bagi aparat yang mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pemberian insentif ini berupa tambahan upah kepada para petugas yang melakukan pekerjaan rangkap. Di samping itu diberikan juga insentif apabila pada saat rekapitulasi dari penerimaan retribusi bulanan telah tercapai melebihi target yang ditetapkan.

Hal ini didukung oleh pernyataan A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000:89) yang menyatakan bahwa insentif kerja adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemimpin organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, atau dengan kata lain, insentif kerja merupakan pemberian uang di luar gaji yang dilakukan oleh pihak pemimpin organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada organisasi.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala SKPD Dispora Kabupaten Sidenreng Rappang, prioritas utama adalah sumber daya pengelolanya sehingga dapat meningkatkan kreatifitas menuju pemberdayaan dalam penambahan sumber pendapatan asli daerah. (Wawancara tanggal 1/3/2013).

1. Faktor komunikasi

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lokasi wisata, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini ini merupakan usaha pemerintah dalam rangka menumbuhkan pengertian atau pemahaman masyarakat tentang pariwisata, sehingga diharapkan dapat menimbulkan partisipasi aktif dari masyarakat maupun wisatawan.

Tumbuhnya partisipasi masyarakat sebagai wisatawan dalam mengunjungi lokasi-lokasi wisata merupakan bukti sosialisasi yang di dilakukan oleh pemerintah telah diterima baik oleh masyarakat. Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah tersebut sesuai dengan jawaban responden, di mana dapat diketahui bahwa responden memberi jawaban maksimal tentang sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah yaitu terdapat 47 orang (76,60%), yang menyatakan sangat maksimal terdapat 6 responden (9,52%), dan yang memberikan jawaban cukup memadai hanya terdapat 10 responden (15,87%), sedangkan tidak ada responden yang memberi jawaban kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Budaya dan Pariwisata, mengatakan bahwa usaha untuk mensosialisasikan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah di lakukan dengan berbagai cara baik di media cetak maupun media elektronik, pemerintah juga seringkali mengangkat even bertemakan budaya yang di pusatkan di tempat-tempat wisata, seperti yang telah di lakukan beberapa kali di Wisata Datae.

1. Faktor pengetahuan

Tidak dapat dipungkiri dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat, tidak terlepas dari usaha pemerintah terutama dalam mengadakan bimbingan ataupun penyuluhan dan satu hal yang penting adalah kejelian pemerintah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan pariwisata. Dan dalam hal ini secara umum dinilai sudah baik oleh masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat pada hasil olahan data, di mana dapat diketahui bahwa kemampuan pemerintah sudah maksimal, dimana terdapat 38 orang (60,31%) menjawab baik, 13 orang (20,63%) responden menyatakan sangat baik, dan hanya 12 orang (19,04%) yang menyatakan cukup memadai, sedangkan tidak ada responden yang memberi jawaban kurang baik.

Hal ini bisa terwujud dengan adanya usaha pemerintah dengan cara mengikutsertakan aparat dinas dalam peningkatan pariwisata untuk mengikuti kursus-kursus dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bimbingan dan arahan tentang usaha yang dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sektor pariwisata. Sebagai pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sangat mendukung untuk membenahi sehingga objek wisata tersebut dapat setara dengan objek wisata lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

* 1. Jika dilihat secara keseluruhan dari jawaban responden maka dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan lokasi Wisata Datae dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk baik.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan lokasi Wisata Datae dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor budaya, faktor komunikasi, faktor pengetahuan, faktor motivasi, dan faktor penunjang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 2001. *Prosedur Penelitian. Rineka Cipta*, Jakarta.

Hasan, Shadili, 2003. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Binaksaa. Jakarta.

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Research. Jakarta*, Jakarta, Fakultas Psikologi UGM.

Hasibuan, Malayu. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Gunung Agung. Jakarta.

Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Rineka Cipta. Jakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Manila, IGK. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Moenir, HAS. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Moh. Nazir. 2002. *Metode Penelitian. Ghalia Indonesia,* Jakarta.

Musanef. 2002. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia.* Gunung Agung. Jakarta.

Sadu, Wasistiono, 2001. *Pemberdayaan Aparatur Dareah*. Abdi Praja, Bandung.

Sudjadi. 2001. *Organisasi dan Manajemen Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*. Gunung Agung. Jakarta.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi.* Alfabeta. Bandung.

The Liang, Gie. 2003. *Efisiensi Kerja Pegawai*. Edisi Ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Tulus, Agus. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.